KEARIFAN LOKAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER

Oleh:

Maskud

Fakultas Dakwah IAIN Jember

maskudjbr@gmail.com

ABSTRACT

Basically, disaster management is a matter for all parties. There are three pillars of disaster management actors, such as government and local governments, communities, and the business world. The third role players were regulated in Law No. 24 Year 2007 on Disaster Management. However, the fact that occurred in the district of Jember Panti different than expected, relations and cooperation in disaster response among government, society, and the business world has not run optimally. The limited ability of the government to cope with the disaster, encouraging local communities to initiate disaster management on the basis of local knowledge (local wisdom). Two of these initiatives, from government and local communities, sometimes forming synthesis of natural disaster management policies are effective enough to reduce the number of victims and losses. Based on this background, the focus of this research is: how local knowledge in disaster management of flash floods and landslides in Jember District Subdistrict Panti? The focus of the study include: the implementation of disaster management of flash floods and landslides; all kinds of local knowledge in disaster management of flash floods and landslides; and the impact of local knowledge on disaster prevention of flash floods and landslides in Jember District Panti subdistrict.

Keywords: *Local Wisdom, Disaster Floods and Landslides*

PENDAHULUAN

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikehruarkannya Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Pera-

Maskud

turan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah: (1) Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi; (2) Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi; (3) Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana.

Berbagai kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan pendirian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta masih akan dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaan. Sementara proses pengembangan kebijakan sedang berlangsung, proses lain yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional.

Bencana alam memang merupakan hal yang sangat menakutkan untuk dirasakan. Banyak bencana alam yang disebabkan bukan hanya karena alam tetapi ulah manusia juga. Bencana alam tentunya bukan hanya dapat merusak fasilitas dan hal-hal dilingkungan kita. Namun juga banyak memakan korban. Namun tak jarang penyebabnya juga berasal dari *human errors*. Apalagi jika bencana itu memberikan kerugian masal. Bencana alam yang besar sudah banyak terjadi di seluruh dunia. Dari banyaknya bencana tersebut selalu saja memakan korban dan juga memberikan kerugian material yang besar.

Dalam catatan BNPB, selama 5 tahun terakhir di Indonesia telah terjadi bencana alam sebanyak 158.238 kasus meliputi bencana gunung berapi, banjir, kekeringan, angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, kebakaran permukiman dan

bencana alam lainnya. Data BNPB juga menyebutkan bahwa diantara bencana alam yang terjadi di Indonesia paling banyak adalah bencana banjir baik itu banjir bandang, banjir lumpur, banjir lahar dingin, banjir air laut pasang, dan banjir lainnya. Untuk tahun 2012 saja, bencana banjir di Indonesia telah terjadi sebanyak 4.291 kasus.¹

Wilayah di Kecamatan Panti terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan dengan ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana *hidrometeorologi* seperti banjir dan tanah longsor. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi secara silih berganti.

Secara historis, salah satu bencana alam yang terjadi adalah banjir bandang yang melanda Kecamatan Panti pada tanggal 1-2 Januari 2006, yang dapat dikategorikan sebagai banjir bandang yang melanda 3 desa, yaitu: Kemiri, Suci, dan Panti yang ketiganya termasuk dalam wilayah Kecamatan Panti. Terdapat tiga faktor utama penyebab banjir bandang di Kabupaten Jember, yaitu: faktor *hidrometeorologi*, kondisi fisik morfometri DAS Kali-putih, serta penutupan lahan. Ketiga faktor tersebut menyebabkan meningkatnya *overland flow* yang bercampur kikisan tanah akibat perubahan *land cover*. Bencana banjir bandang yang terjadi di kecamatan Panti kabupaten Jember tersebut, menyebabkan 119 orang tewas dan bangunan rusak dengan kerugian mencapai Rp. 60 milyar.²

Kejadian bencana di atas umumnya berdampak merugikan, baik korban jiwa maupun harta. Rusaknya sarana dan prasarana fisik (perumahan penduduk, bangunan perkantoran, sekolah, tempat ibadah, sarana jalan, jembatan dan lain-lain sarana pelayanan publik) hanyalah sebagian kecil dari dampak terjadinya bencana alam di samping masalah turunnya kualitas ke-

¹ BNPB. *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. (Jakarta: BNPB, 2012), hlm. 158

² <http://www.ugm.ac.id/>, 07 Juli 2015

Maskud

sejahteraan sosial masyarakat akibat luka dan kehilangan harta benda serta hilangnya lahan produktif masyarakat.

Upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial akibat bencana alam merupakan rangkaian kegiatan penanggulangan. Secara umum kegiatan penanggulangan bencana alam dapat dibagi ke dalam tiga kegiatan utama, yaitu: (1) kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini; (2) kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan *Search And Rescue* (SAR), bantuan darurat dan pengungsian; dan (3) kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Meskipun demikian, berdasarkan Kajian Tentang Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia yang dilakukan Bappenas tahun 2008, mengatakan bahwa tindakan penanggulangan bencana di Kabupaten Jember selama ini pada tahap Pra-bencana termasuk pencegahan, mitigasi, dan kesiap-siagaan ditunjukkan, namun hampir seluruh hal tidak jelas mengenai isinya dan belum dilaksanakan.³

Pada dasarnya, penanggulangan bencana merupakan urusan semua pihak. Ada tiga pilar pelaku penanggulangan bencana, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia usaha. Peran ketiga pelaku itu diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peran pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; peran masyarakat diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27; dan peran lembaga usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29.⁴

Namun, kenyataan yang terjadi di Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Panti, berbeda dengan yang diharapkan, relasi dan kerjasama dalam hal penanggulangan bencana antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha belum berjalan optimal. Hal itu terjadi karena terdapat dominasi di pihak pemerintah daerah (klas elit) terhadap masyarakat. Terdapat monopoli kekuasaan peran birokrat terhadap hak-hak dasar warga negara yang menginginkan adanya persamaan dan keadilan dalam ikut menentukan, melaksanakan, dan menilai kebijakan pemerintah daerah yang telah

³ BAPPENAS. *Telaahan Sistem Terpadu Penanggulangan Bencana di Indonesia (Kebijakan, Strategi, dan Operasi)*. (Jakarta: Bappenas, 2008), hlm. 98

⁴ Lihat UU No. 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*

dijamin undang-undang. Selain itu, pihak masyarakat sendiri hanya menunggu dimobilisasi (digerakkan) oleh pemerintah ketika terjadinya bencana. Sedangkan, peran dunia usaha saat ini masih sebatas berupa pemberian bantuan pasca terjadinya bencana saja. Padahal, dalam pengurangan resiko bencana yang diupayakan adalah antisipasi bencana dan perubahan iklim. Parahnya, masih banyak sekali usaha-usaha yang justru merusak lingkungan.

Terbatasnya kemampuan pemerintah untuk mengatasi bencana di Kecamatan Panti Kabupaten Jember, mendorong masyarakat setempat untuk memprakarsai penanggulangan bencana atas dasar kearifan lokal (*local wisdom*). Dua prakarsa tersebut, dari pemerintah dan masyarakat setempat, terkadang membentuk sintesis kebijakan penanggulangan bencana alam yang cukup efektif untuk mengurangi jumlah korban dan kerugian bencana.

Kenyataan bahwa Kecamatan Panti begitu dekat dan sering terjadi bencana, maka bagi sebagian masyarakat telah terbiasa dengan keadaan ini. Mereka pun mulai mengembangkan pengetahuan tentang bencana alam sebagai kearifan lokal. Masyarakat kemudian mempunyai pengetahuan tentang tanda-tanda yang diberikan oleh alam akan terjadinya bencana. Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat merupakan potensi yang sangat berharga untuk bisa dimanfaatkan dalam menghadapi persoalan-persoalan bencana alam yang selalu melanda suatu wilayah.

Sartini mengungkapkan, kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.⁵ Pengertian lain yang senada diungkapkan oleh Zulkarnain dan Febriamansyah, berupa prinsip-prinsip dan cara-cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungannya dan ditransformasikan dalam bentuk sistem nilai dan norma adat.⁶ Kongprasertamorn juga berpendapat bahwa kearifan lokal

⁵ Sartini. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat*. (Jurnal Filsafat, 2004, 37), hlm. 111

⁶ Zulkarnain dan Febriamansyah, R. *Kearifan Lokal dan Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya Pesisir*. (Jurnal Agribisnis Kerakyatan, 2008), hlm. 72

Maskud

mengacu pada pengetahuan yang datang dari pengalaman suatu komunitas dan merupakan akumulasi dari pengetahuan lokal. Kearifan lokal itu terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu.⁷

Kajian tentang kearifan lokal dan penanggulangan bencana pada masyarakat tradisional sejatinya terlihat dalam kaitannya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pada masyarakat tradisional (lokal) dan alam adalah satu kesatuan karena keduanya sama-sama ciptaan Yang Maha Kuasa. Alam dan manusia diyakini sama-sama memiliki roh. Alam bisa menjadi ramah jika manusia memperlakukan secara arif dan sebaliknya akan bisa marah jika kita merusaknya. Jika alam marah sehingga muncul bencana alam berupa banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya, maka masyarakat tradisional umumnya juga memiliki pengetahuan lokal dan kearifan ekologi dalam memprediksi dan melakukan mitigasi bencana alam di daerahnya.

Terkadang kearifan lokal yang dimiliki masyarakat di Kecamatan Panti dalam membaca tanda-tanda akan terjadi bencana tidak bisa dirasionalkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Ini adalah bagian dari pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang perlu terus diselidiki dan dikembangkan untuk menjadikan masyarakat semakin meningkat kapasitasnya dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi, dan menjadikan mereka semakin waspada. Karena sekarang ini masyarakat mengalami *disorientasi cultural*. Mereka mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan semakin tidak memahami kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Pengetahuan lokal dianggap barang kuno dan ilmu pengetahuan dianggap modern. Modernitas telah menggerus nilai-nilai lokalitas yang sudah tertanam sejak dulu dalam masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, dalam masyarakat lokal terkadang praktik penanggulangan bencana juga dilakukan dengan memadukan antara kearifan lokal dengan ritual agama.

Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa kearifan lokal (*local wisdom*) dapat mendorong pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk menyiagakan diri dalam mencegah serta mengurangi dampak dan resiko bencana yang terjadi di lingkungannya. Program berbasis masyarakat di-

⁷ Kongprasertamorn, K. *Local Wisdom, Environmental Protection And Community Development: The Clam Farmers In Tabon Bangkhusai, Phetchaburi Province, (Thailand. Manusa: Journal of Humanities, 2007)*, hlm. 2

terapkan karena masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak bencana, harus diberdayakan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, sehingga mampu melakukan upaya penanggulangan dampak bencana dan pengurangan resiko.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penelitian ini menjadi penting mengingat kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial yang ada akibat bencana alam, maka dipandang perlu melihat kembali dan meneliti terkait *“Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.”*

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang tidak bisa dijelaskan dan dianalisa melalui data-data statistik sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial sebagai upaya menjaring informasi secara mendalam dari suatu fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.

Sedangkan, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial atau fenomena alam secara sistematis, faktual dan akurat.

KEARIFAN LOKAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER.

Kegiatan penanggulangan bencana pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. Pra bencana yang meliputi usaha-usaha pencegahan dan mitigasi, pengurangan dampak bahaya, kesiapsiagaan; saat terjadinya bencana yaitu fase tanggap darurat; serta pasca bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Maskud

Berdasarkan temuan di lapangan, secara umum dapat disimpulkan bahwa penanggulangan bencana di Kecamatan Panti Kabupaten Jember selama ini belum optimal dilakukan dalam domain-domain bencana yang spesifik dan bervariasi. Penanggulangan umumnya dilakukan dalam kondisi tanggap darurat, reaktif ketika bencana terjadi, dan pasca bencana saja, dengan data dan informasi sangat minim, belum dilakukan secara proaktif untuk mencegah dan mengurangi dampak resiko bencana.

Sedangkan pihak masyarakat atas inisiatif mereka sendiri melakukan penghijauan di lokasi rawan bencana dan menerapkan kearifan lokal yang mereka yakini secara turun-temurun untuk mencegah dan mendeteksi tanda-tanda bencana. Upaya penguatan kapasitas masyarakat dengan membangun mitigasi bencana tidak dapat terlepas dari kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat dalam menghadapi bencana. Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal masyarakat yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Identifikasi ini menjadi langkah awal yang penting untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, dalam rangka mewujudkan mitigasi bencana berbasis masyarakat yang efektif.

Kearifan lokal (*local wisdom*) dalam dekade belakangan ini sangat banyak diperbincangkan. Perbincangan tentang kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal dan dengan pengertian yang bervariasi. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.⁸

Upaya mitigasi bencana yang telah dilakukan masyarakat Kabupaten Jember sendiri berupa beberapa kearifan lokal (*local wisdom*). Terdapat beberapa kearifan lokal terkait dengan mitigasi bencana di Kabupaten Jember. Namun, terkadang kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Jember dalam menghindari bencana tidak dapat dirasionalkan menggunakan ilmu pengetahuan. Kearifan lokal yang masih berlaku pada masyarakat di kabupaten Jember yaitu: *Ruwatan* (Bersih Desa). *Ruwatan* adalah salah satu upacara tradisional dengan tujuan utama mendapatkan keselamatan supaya orang terbebas dari segala macam kesialan hidup, nasib jelek, dan selanjutnya agar dapat mencapai kehidupan yang *ayam-ayem-tentrem* (aman,

⁸ Sartini, *Menggali Kearifan Lokal...*, 111

bahagia, dan damai). Tradisi *Rimatan* (bersih desa) di Kabupaten Jember dilaksanakan pada bulan *Suro*. Tradisi tersebut diawali dengan *selamatan* (tasyakuran), berdoa bersama, *nyekar* (*tawassul* dan mendoakan para leluhur setempat), kemudian dilanjutkan dengan gotong-royong membersihkan lingkungan desa.

Kearifan lokal (*local wisdom*) di atas merupakan sarana yang dapat digunakan untuk membangun keharmonisan sosial. Peserta dan pelaku upacara tidak menonjolkan latar belakang keyakinan yang dipeluknya. Artinya, upacara ini tidak memberi peluang akan tumbuhnya sekat-sekat sosial dalam pelaksanaannya, karena mereka memiliki tujuan yang sama, yakni membangun harmoni, keselarasan, dan keseimbangan, baik dengan Tuhan, kekuatan ghaib yang lain, maupun dengan sesama. Dalam upacara tradisional, kepentingannya hanya satu, yakni memohon keselamatan dan perlindungan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Rappaport, bahwa upacara tradisional menghadirkan serangkaian tindakan dan tuturan yang tidak dirahasiakan oleh para pelakunya. Semua pelaku upacara dapat mengungkapkan tujuannya secara terbuka. Bentuk pusaka budaya ini bukan semata-mata salah satu cara berkomunikasi yang dikukuhkan oleh para pelaku dan pendukungnya, melainkan melalui tradisi ini, diharapkan juga terjadinya hubungan lain, yang terbangun dari bahasa dan tindakan yang dijadikan mediumnya.⁹

Selain upaya mitigasi bencana, masyarakat Kecamatan Panti Kabupaten Jember juga mempunyai kearifan lokal terkait dengan sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini itu dilakukan masyarakat di Kabupaten Jember dalam membaca tanda-tanda bencana banjir dan tanah longsor dengan beberapa cara tradisional berikut:

1. Membaca karakteristik pegunungan Argopuro dan kondisi air sungai
2. Memperhatikan isyarat hewan Capung dan Burung
3. Memperhatikan munculnya mata air baru secara tiba-tiba
4. Memprediksi melalui intensitas dan lamanya curah hujan
5. Memantau debit aliran di hulu sungai.

Kearifan lokal sesungguhnya merupakan bagian dari etika dan

⁹ Rappaport. "Ritual" dalam Richard Bauman. 1992. *Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainmentst*. (New York: Oxford University Press, 1992), him. 249

Maskud

moralitas yang membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bertindak khususnya dibidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam. Bahasan ini sangat membantu kita dalam hal mengembangkan perilaku, baik secara individu maupun secara kelompok dalam kaitan dengan lingkungan dan upaya pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu membantu kita untuk mengembangkan sistem sosial politik yang ramah terhadap lingkungan serta mengambil keputusan dan kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan atau sumberdaya alam.¹⁰

Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam suatu sistem sosial masyarakat, dapat dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk dan menuntun pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap alam maupun terhadap alam. Ataupun mengatakan bahwa kearifan lokal bersifat historis tetapi positif. Nilai-nilai diambil oleh leluhur dan kemudian diwariskan secara lisan kepada generasi berikutnya lalu oleh ahli warisnya tidak menerimanya secara pasif dapat menambah atau mengurangi dan diolah sehingga apa yang disebut kearifan itu berlaku secara situasional dan tidak dapat dilepaskan dari sistem lingkungan hidup atau sistem ekologi/ekosistem yang harus dihadapi orang-orang yang memahami dan melaksanakan kearifan itu.¹¹

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kearifan tercermin pada keputusan yang bermutu prima. Tolok ukur suatu keputusan yang bermutu prima adalah keputusan yang diambil oleh seorang tokoh/ sejumlah tokoh dengan cara menelusuri berbagai masalah yang berkembang dan dapat memahami masalah tersebut. Kemudian diambil keputusan sedemikian rupa sehingga yang terkait dengan keputusan itu akan berupaya melaksanakannya dengan kisanan dari yang menolak keputusan sampai yang benar-benar setuju dengan keputusan tersebut.

Namun demikian, potensi kearifan lokal tersebut tidak akan bisa dikelola apabila dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, yaitu (1) kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bencana (*hazards*); (2)

¹⁰ Stanis, *Menggali Kearifan Lokal...*, 24-27

¹¹ Atupah, *Peluang Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam Pembangunan Kehutanan*. Kupang: Dephut Press, 2004), hlm. 34

sikap dan perilaku yang mengakibatkan rentannya kualitas sumber daya alam (*vulnerability*); (3) kurangnya informasi peringatan dini sehingga mengakibatkan ketidaksiapan; (4) ketidakberdayaan/ketidakmampuan dalam menghadapi bahaya. Karena itu perlu diupayakan program yang praktis namun sistematis dalam memberikan pemahaman karakteristik bencana, yaitu usaha mitigasi bencana.¹²

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada istilah '*empowerment*' yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*), sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Menurut Moebyarto bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka.¹³

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community-based management*), yang merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan kebijakan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*).

Hal yang menarik dari macam-macam kearifan lokal yang dimiliki masyarakat di Kecamatan Panti sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah bahwa mereka begitu menyadari akan betapa pentingnya sumberdaya alam dalam menopang kehidupan mereka. Tindakan yang bersifat destruktif terhadap kekayaan sumberdaya alam. Semacam ada rasa takut, mereka percaya jika tindakan mereka tidak sesuai dengan kehendak alam, bersifat merusak, lambat laun cepat atau lambat mereka akan mengalami resiko.

Makna lain yang dapat disimak dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di lokasi penelitian yakni selalu tercipta suasana kekerabatan dan

¹² Maryani, Enok. *Model Sosialisasi...*, 56

¹³ Wahyano, A. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2001), him. 34

Maskud

kegotong royongan diantara masyarakat. Selalu tercipta hubungan sosial yang harmonis, saling membantu. Mereka mempersepsikan kearifan lokal sebagai suatu yang dapat menata kehidupan baik antar mereka sebagai komunitas sosial maupun dengan alam sebagai komunitas ekologis. Mereka menyadari pula bahwa eksistensi kehidupan mereka tidak terlepas dari eksistensi kehidupan makhluk lain dalam bumi yang satu sama ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat lokal, ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan adat, kearifan dan tradisi yang ada sangat dijunjung tinggi. Di lain pihak, masyarakat pedesaan mempunyai respons yang *pesimistis* terhadap kebijakan formal yang diterapkan oleh pemerintah.

Kearifan lokal sangat penting untuk dipertimbangkan dalam identifikasi kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan diketahuinya kearifan lokal yang ada, level kapasitas masyarakat dapat terukur, sehingga dapat diketahui model sistem mitigasi bencana yang berbasis masyarakat seperti apa yang paling efektif untuk diimplementasikan. Hal ini penting mengingat masyarakat di daerah rawan bencana pada umumnya sudah mempunyai sistem peringatan dini yang bersifat lokal, walaupun belum terstruktur. Dengan demikian, model sistem peringatan dini yang akan diterapkan akan mengadaptasi kearifan lokal masyarakat yang sudah ada selama ini.

Dari uraian di atas, masyarakat perlu didorong kesadaran dan kapasitasnya untuk menghadapi ancaman alam di sekitarnya, melalui pendekatan yang bersifat kultural, memanfaatkan *local wisdom* yang telah ada. Masyarakat juga perlu diberi kemudahan untuk mendapatkan akses dalam beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka tinggal. Dalam hal ini, kapasitas yang diharapkan mampu mengatasi semua ancaman, haruslah didukung oleh pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Hal yang krusial adalah bagaimana pemerintah, baik pusat dan daerah memberikan ruang tumbuh kembangnya *local wisdom* yang dapat digunakan sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana.¹⁴ Misalnya, sumber peringatan dini yang dianggap efektif adalah tokoh masyarakat, baik yang bersifat formal maupun non formal. Bila kepala dusun atau ketua RT/RW dimasukkan ke dalam tokoh masyarakat secara formal, dan kiai atau "*sesepuh*" sebagai tokoh

¹⁴ Maarif, *Sosiologi Kebencanaan...*, 19

masyarakat non-formal, maka kepercayaan untuk memberikan peringatan dini dianggap paling efektif dibandingkan dengan pihak BPBD atau pemerintah daerah. Ini menunjukkan memberikan kepercayaan dalam mengkoordinir masyarakat apabila terjadinya bencana.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis serta pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana bandang dan tanah longsor di Kecamatan Panti Kabupaten Jember selama ini belum optimal dilakukan dalam domain-domain bencana yang spesifik dan bervariasi. Penanggulangan umumnya dilakukan dalam kondisi tanggap darurat, reaktif ketika bencana terjadi, dan pasca bencana saja, dengan data dan informasi sangat minim, belum dilakukan secara proaktif untuk pengurangan resiko bencana.
2. Kearifan lokal yang masih berlaku dan diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Panti, diantaranya yaitu: *Ruwatan* (bersih desa); Membaca karakteristik pegunungan Argopuro dan kondisi air sungai di sekitar; Memperhatikan isyarat Capung dan Burung; Memperhatikan munculnya mata air baru secara tiba-tiba; Memprediksi banjir melalui intensitas dan lamanya curah hujan; dan Memantau debit aliran di hulu sungai.
3. Terdapat tiga dampak/aspek kearifan lokal yang dapat digunakan dalam penanggulangan bencana di Kecamatan Panti yaitu: (1) Praktek dan strategi kearifan lokal dapat membantu mitigasi. (2) Penggabungan strategi dan praktek kearifan lokal dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memberdayakan anggotanya. (3) Kearifan lokal dapat meningkatkan implementasi proyek, memberikan informasi tentang konteks lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986)
- Bakornas PB. *Pedoman Penanggulangan Banjir*. (Jakarta: Bakornas PB, 2007)
- BAPPENAS. *Telaahan Sistem Terpadu Penanggulangan Bencana di Indonesia (Kebijakan, Strategi, dan Operasi)*. (Jakarta: Bappenas, 2008)
- Bappenas. *Telaahan Sistem Terpadu Penanggulangan Bencana di Indonesia (Kebijakan, Strategi, dan Operasi)*. (Jakarta: Bappenas, 2009)
- BNPB. *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. (Jakarta: BNPB, 2012)
- Djalal, MZA. *Bencana Alam dan Implementasi Tata Ruang di Kabupaten Jember*. laporan tidak terbit. (Jember: BAPPEKAB, 2006)
- JICA dan YPM. *SOP Sistem Peringatan Dini Sebelum Kejadian Banjir Bandang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kelijompo di Kabupaten Jember*. (Jember: JICA, 2010)
- JICA dan YPM. *SOP Sistem Peringatan Dini Sebelum Kejadian Banjir Bandang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalipakis di Kabupaten Jember*. (Jember: JICA, 2011)
- Kementrian Sosial RI. *Memberdayakan Kearifan Lokal bagi Komunitas Adat Terpencil*. (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2006)
- Keraf, S. A. *Etika Lingkungan*. (Jakarta: Pn. Buku Kompas, 2002)
- Kongprasertamorn, K. *Local Wisdom, Environmental Protection And Community Development: The Clam Farmers In Tabon Bangkbusai, Phetchaburi Province, (Thailand)*. Manusya: Journal of Humanities, 2007)
- Maarif, Syamsul. *Sosiologi Kebencanaan dan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Sosiologi Kebencanaan)*. (Jember: Universitas Jember, 2015)
- Maryani, Enok. *Model Sosialisasi Mitigasi Pada Masyarakat Daerah Rawan Bencana di Jawa Barat*. (Bandung: Penelitian Hibah Dikti, 2008)
- Matsumoto, David. *Budaya dan Psikologi*. (Belmont: Wadsworth, 2000)
- Mujiyono, Abdillah. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Quran*. (Jakarta: Paramadina, 2001)

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*
- Rahyono. *Kearifan Budaya*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Rappaport. "Ritual" dalam Richard Bauman. 1992. *Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainmentst*. (New York: Oxford University Press, 1992)
- Sarlito, Wirawan S. *Psikologi Lingkungan*. (Jakarta: Grasindo, 1992)
- Sartini. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat*. (Jurnal Filsafat, 2004, 37)
- Setiono, K. "Pengembangan Psikologi Indigenous di Indonesia", dalam Jurnal Ilmiah Psikologi, (Kognisi UMS, Vol. 6, Nomor 2 Nopember 2002)
- Stanis, Stefanus. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Tesis yang tidak dipublikasikan, 2005
- Subowo, E. *Pengenalan Gerakan Tanah*. (Bandung: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2003)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Triutomo, Sugeng. *Prinsip Dasar Manajemen Bencana: Makalah*. (Jakarta: Bakornas RB, 2008)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Wahyono, A. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001)
- Zulkarnain dan Febriamansyah, R. *Kearifan Lokal dan Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya Pesisir*. (Jurnal Agribisnis Kerakyatan, 2008)
- Tabloid Situs Talenta*, Edisi 70, 11/2013
- Radar Jember*, Edisi 03/02/2014
- <http://antaratim.com/>, 26 Agustus 2015
- <http://antaranews.com/>, Diakses pada tanggal 02 September 2015
- <http://titik0km.com/>, Diakses pada tanggal 16 Oktober 2015
- <http://www.ugm.ac.id/>, Diakses pada tanggal 07 Juli 2015

Maskud